

**Article Type:** Research Paper

## **Kualitas Penerimaan, Pengeluaran dan PDRB Provinsi di Indonesia**

Alno Sardi Putra<sup>1</sup>, Ali Anis<sup>2</sup>

<sup>a</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Corresponding Author : [alnosardiputra69@gmail.com](mailto:alnosardiputra69@gmail.com)

### **Abstract**

*This study has three main objectives, namely, first to find out how the causal relationship between local government revenue and local government expenditure in provinces in Indonesia, the second objective is to find out how the causal relationship between local government expenditure and GRDP in provinces in Indonesia. Meanwhile, the third objective is to determine the causal relationship between local government revenue and GRDP in provinces in Indonesia. In this study, the objects in this study are 33 provinces throughout Indonesia. The data used are from 2010 to 2019. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used is the Granger causality test which is processed using Eviews. Based on the results of hypothesis testing, it shows that: (1) There is a reciprocal causal relationship between local government revenues and regional government expenditures in provinces in Indonesia in the western region. Thus the hypothesis is accepted. (2) There is a reciprocal causal relationship between local government revenues and local government expenditures in provinces in Indonesia in the eastern region. Thus the hypothesis is accepted. (3) There is no causal relationship between local government expenditure and GRDP, but there is a relationship between GRDP transfer and expenditure in 33 provinces in Indonesia in the western region. Thus the hypothesis is rejected. (4) There is no causal relationship between local government expenditure and GRDP, but there is a relationship between GRDP transfer and expenditure in provinces in Indonesia in the eastern region. Thus the hypothesis is rejected. (5) There is no causal relationship between GRDP and local government revenues in provinces in western Indonesia. However, there is a one-way relationship between government revenue and GDP. Thus the hypothesis is rejected. (6) There is no causal relationship between GRDP and local government revenues in provinces in eastern Indonesia. However, there is a one-way relationship between government revenue and GDP. Thus the third hypothesis is rejected.*

**Keywords:** Government Revenue, Government Expenditure & GRDP

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah barat. (2) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. (3) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia wilayah barat. (4) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. (5) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia di wilayah barat. (6) untuk mengetahui hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada provinsi di Indonesia wilayah timur. Pada penelitian ini yang menjadi objek adalah 33 provinsi di seluruh Indonesia. Data yang digunakan dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder

### **AFFILIATION**

Jurusan Ilmu  
Ekonomi, Fakultas  
Ekonomi, Universitas  
Negeri Padang

### **DOI**

-

### **KUTIPAN:**

Putra,A,S & Anis, A  
Kausalitas penerimaan,  
pengeluaran dan PDRB  
Provinsi di Indonesia 3(2)  
89-104

### **INFO ARTIKEL :**

#### **Diterima:**

2 April 2021

#### **Disetujui:**

5 Mei 2021

#### **Terbit Daring:**

1 June 2021

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah pengujian clausality granger yang diolah dengan menggunakan Eviews. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa: (1) Terdapat hubungan kausalitas timbal balik antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah barat. Dengan demikian hipotesis di terima. (2) Terdapat hubungan kausalitas timbal balik antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. Dengan demikian hipotesis di terima. (3) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB tetapi terdapat hubungan serah PDRB dengan pengeluaran pada 33 provinsi di Indonesia di wilayah barat. Dengan demikian hipotesis ditolak. (4) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB tetapi terdapat hubungan serah PDRB dengan pengeluaran pada provinsi di Indonesia di wilayah timur. Dengan demikian hipotesis ditolak. (5) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara PDRB dengan penerimaan pemerintah daerah pada Provinsi di Indonesia wilayah barat. Akan tetapi terdapat hubungan satu arah antara penerimaan pemerintah dengan PDRB. Dengan demikian hipotesis ditolak. (6) Tidak terdapat hubungan kausalitas antara PDRB dengan penerimaan pemerintah daerah pada Provinsi di Indonesia wilayah timur. Akan tetapi terdapat hubungan satu arah antara penerimaan pemerintah dengan PDRB. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

**Kata Kunci:** Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah & PDRB

Kode Klasifikasi JEL : H71, H50

## PENDAHULUAN

Timbulnya suatu proses distribusi anggaran kepada daerah sebagai konsekuensi penyerahan ataupun pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip *money follows function* merupakan akibat adanya desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber pendanaan serta wewenang untuk membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah merupakan suatu bentuk desentralisasi fiskal.

Sistem desentralisasi fiskal telah berkembang di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Secara umum, desentralisasi fiskal terbagi menjadi dua bagian, diantaranya sisi pengeluaran dan sisi penerimaan. Pada sisi pengeluaran, daerah berhak menentukan alokasi belanja daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakat daerah tersebut (Lessmann and Markwardt, 2012). Pada sisi penerimaan, daerah mendapatkan sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerahnya. Salah satu implementasi utama dari teori ekonomi dan politik pada desentralisasi fiskal adalah mencapai otonomi suatu daerah dengan memperbesar pajak daerah daripada tingkat transfer pemerintah pusat. Oleh sebab itu, transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dialokasikan setelah daerah mengusahakan peningkatan asli daerah mereka.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019**

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>275,571,195,995</b>	<b>323,493,250,792</b>	<b>335,585,811,291</b>	<b>357,559,640,616</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>133,179,011,317</b>	<b>149,307,806,874</b>	<b>158,721,480,199</b>	<b>169,993,478,633</b>
Pajak Daerah	112,689,762,824	125,806,425,501	136,095,291,940	144,039,477,959
Retribusi Daerah	1,875,861,563	1,730,752,091	1,581,850,373	1,773,258,727
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	3,158,771,341	3,460,154,777	3,647,165,336	4,265,866,248
Lain-lain PAD yang Sah	15,454,615,589	18,310,474,505	17,397,172,550	19,914,875,699
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>113,733,211,865</b>	<b>149,297,354,493</b>	<b>152,285,491,118</b>	<b>159,262,926,416</b>
Bagi Hasil Pajak	22,178,206,076	26,118,682,296	24,672,298,504	19,350,728,359
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8,488,357,513	7,416,668,470	10,457,854,069	14,976,063,612
Dana Alokasi Umum	38,538,077,004	55,763,530,032	56,606,500,497	58,691,805,994
Dana Alokasi Khusus	44,528,571,272	59,998,473,695	60,548,838,048	66,244,328,451
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28,658,972,813	24,888,089,425	24,578,839,974	28,303,235,567
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22,279,863,464</b>	<b>26,118,294,258</b>	<b>35,358,712,123</b>	<b>38,495,945,337</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>297,851,059,459</b>	<b>349,611,545,050</b>	<b>370,944,523,414</b>	<b>396,055,585,953</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat kita lihat realisasi penerimaan PAD Provinsi se-Indonesia. Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 meningkat tinggi sebesar 17,39% dari tahun 2016, tahun 2018 meningkat sebesar 3,73% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,54% dari tahun 2018. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2017 menurun yang cukup banyak sebesar 13,15% dari tahun 2016, tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 1,24% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 15,15% dari tahun 2018.

Penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan ini diikuti dengan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan, tetapi tidak setajam peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat sangat penting bagi pembiayaan pembangunan daerah. Adi (2008) menyatakan bahwa proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap penerimaan suatu daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lainnya.

Tingginya peranan transfer dari pemerintah pusat dan rendahnya PAD menunjukkan masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal. Padahal misi desentralisasi fiskal mengindikasikan bahwa pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan belanja daerah. Menurut prinsip efisiensi nasional, daerah didorong untuk meningkatkan peran pajak dari jenis pajak yang telah diciptakan pemerintah tanpa menambah jenis pajak baru sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah kota ataupun kabupaten harus menetapkan jenis pajak yang telah di atur dalam peraturan pemerintah. Artinya, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri terutama dalam hal menggali dan meningkatkan potensi sumber daya keuangan daerah.

**Tabel 2 . Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2016-2019**

Jenis pengeluaran	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran (Ribu Rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>157,921,957,110</b>	<b>186,536,045,056</b>	<b>198,762,528,445</b>	<b>214,231,884,921</b>
Belanja Pegawai	41.420.506.302	72.476.771.769	80.186.823.671	81.825.017.957
Belanja Bunga	55.672.199	69.081.721	76.936.258	130.660.326
Belanja Subsidi	947.977.814	1.488.695.545	2.875.010.245	2.943.410.333
Belanja Hibah	53.831.992.474	46.837.931.355	51.941.417.069	50.757.433.632
Belanja Bantuan Sosial	3.404.874.370	4.129.602.807	4.964.332.883	5.272.782.583
Belanja Bagi Hasil	35.733.513.393	40.014.393.679	40.947.409.860	50.938.535.053
Belanja Bantuan Keuangan	22.456.736.129	21.324.385.632	17.650.132.579	22.253.246.109
Pengeluaran Tidak Terduga	61.684.429	195.182.548	120.456.880	110.798.928
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>106,176,521,472</b>	<b>120,503,128,406</b>	<b>127,666,766,106</b>	<b>140,591,613,847</b>
Belanja Pegawai	7.366.638.255	8.365.461.416	5.845.447.878	9.340.178.273
Belanja Barang dan Jasa	54.033.172.998	64.809.070.337	70.299.080.025	80.685.343.512
Belanja Modal	44.776.710.219	47.328.596.653	51.522.238.203	50.566.092.062
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>33,752,580,877</b>	<b>42,572,371,588</b>	<b>44,515,228,863</b>	<b>41,232,087,185</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>297,851,059,459</b>	<b>349,611,545,050</b>	<b>370,944,523,414</b>	<b>396,055,585,953</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap pos pengeluaran mengalami peningkatan. Tahun 2017 mengalami peningkatan pengeluaran yang sangat tajam sebesar 17,38% dari tahun 2016, tahun 2018 mengalami peningkatan pengeluaran sebesar 6,10% dari tahun 2017, dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,77% dari tahun 2018. Rata-rata peningkatan pengeluaran sebesar 10,08%. Peningkatan pengeluaran disebabkan karena adanya peningkatan di setiap pos pengeluaran, baik peningkatan pada pos belanja maupun pos pembiayaan daerah. Selain itu, peningkatan pengeluaran juga dipengaruhi oleh peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini membuktikan bahwa transfer pemerintah pusat mendorong adanya peningkatan belanja, hal ini dimungkinkan akan memicu pertumbuhan PDRB daerah.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu komponen penerimaan pemerintah daerah disamping PAD, akan tetapi apakah transfer pemerintah disuatu periode mampu memberikan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian untuk tahun berikutnya. Artinya seberapa besar proporsisi transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran.

Mengacu kepada data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional diperoleh informasi PDRB dari tahun 2016 mengalami peningkatan. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,23% dari tahun 2016, tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 5,32%, dan tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 4,99%. Rata-rata peningkatan PDRB dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar 5,18%. Hal ini berarti peningkatan PDRB dimungkinkan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran.

Berdasarkan data di atas seperti menggambarkan ketidakefektifan desentralisasi fiskal. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari pengeluaran daerah sebagian besar masih didanai oleh transfer dari pemerintah pusat. Pada kenyataannya, desentralisasi fiskal telah dimulai sejak 25 April 1995 melalui uji coba otonomi daerah di 26 kabupaten/kota di seluruh provinsi (kecuali provinsi DKI Jakarta).

Hipotesis pertama “penerimaan-pengeluaran” yang menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan penerimaan maka menyebabkan perubahan pengeluaran. Hipotesis ini dikembangkan oleh Friedman yang beranggapan bahwa dengan adanya peningkatan

penerimaan pemerintah menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah sehingga defisit anggaran akan terus terjadi. Hipotesis kedua “pengeluaran-penerimaan” yang menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran yang ada pada pemerintah akan menyebabkan peningkatan penerimaan daerah, dengan hubungan kausalitas yang dimulai dari pengeluaran menuju penerimaan. Menurut Ali and Syah (2012) menyatakan bahwa pemerintah terlebih dahulu harus meningkatkan pengeluaran, kemudian baru meningkatkan penerimaan. Hipotesis ketiga “sinkronisasi fiskal” yang menekankan bahwa keputusan penerimaan pemerintah daerah tidak akan terlepas dari keputusan pengeluaran pemerintah. Al-Zeaud (2015), Elyasi dan Rahimi (2012), Mehrara, Pahlavani, and Elyasi (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Akan tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Sahed, Mékidiche, and Kahoui (2020), Mehrara and Rezaei (2014), dan Eita and Mbazima (2008) yang menyatakan bahwa hanya terdapat hubungan kausal searah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berjalan dari penerimaan menuju pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Ali and Syah (2012), dan Anne Sere and Choga (2017) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas jangka panjang ataupun pendek antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah.

Menurut pendekatan Wagner, kausalitas antara pengeluaran dan PDRB berjalan dari peningkatan PDRB ke pengeluaran daerah. Sedangkan menurut pendekatan Keynesian dalam “General Theory of Employment” , kausalitas berjalan dari pengeluaran daerah menuju peningkatan PDRB terutama selama masa resesi. Abu-Eideh (2015), Santi, Jumiarti, and Muslihatinningsih (2018), Wulansari (2009) menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian Baniata, Economies, and Al-waked (2017) yang menyatakan hanya terdapat hubungan kausalitas jangka pendek yang berjalan dari PDRB menuju pengeluaran pemerintah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kausalitas antara Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah**

Hubungan kausal antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah merupakan subjek penting dalam ekonomi publik terutama untuk pengendalian defisit anggaran. Defisit anggaran sangat berdampak terhadap perekonomian. Apabila terjadi keseimbangan fiskal seperti itu, akan berdampak pada menurunnya tabungan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika terjadi penurunan defisit fiskal melalui penurunan pengeluaran pemerintah atau peningkatan penerimaan pemerintah akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, Petanlar dan Sadeghi (2012).

Menurut Buchanan and Wagner (1978), Hubungan penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah terjadi melalui peningkatan pajak, ketika pajak dinaikkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pembelanjaan pemerintah dengan demikian, pemerintah akan membelanjakan seluruh pendapatannya, kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin tinggi. Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi penentu apakah keuangan negara mengalami defisit atau surplus dan menjadi acuan untuk mengambil kebijakan fiskal oleh pemerintah. Peningkatan penerimaan pemerintah selalu berhubungan negatif dengan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan perekonomian, penerimaan pemerintah juga sebagai cadangan devisa negara untuk menstabilkan nilai tukar.

Hasil penelitian Rahayu dan Rahmad (2019) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan secara terencana untuk membiayai berbagai sektor produktif akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah. Penelitian lainnya yang sejalan juga diperoleh oleh Setyawan (2017) menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penerimaan pemerintah. Selanjutnya hasil penelitian yang dikukan oleh Rizki, Sinta, dan Atmono (2019) yang menemukan semakin baik perencanaan pengeluaran pemerintah akan memberikan hasil yang produktif serta mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah.

Endrayana (2003) hubungan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah memiliki arah pengaruh signifikan yang berbeda pada negara-negara sedang berkembang dalam membuat keputusan penganggaran. Dimana pemerintah di negara berkembang biasanya menghadapi adanya *budget constraint* yang lebih besar dibanding dengan negara-negara lain. Pemerintah harus membuat suatu keputusan di antara dua kemungkinan, yaitu menaikkan penerimaan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk menutupi defisit fiskal dan sebagai usaha untuk penyesuaian dalam operasi fiskalnya.

Narayan dan Narayan (2006) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan keterkaitan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Alasan pertama, jika hipotesis “pendapatan dan belanja” berlaku, maka defisit anggaran dapat dihindari dengan menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mendorong kenaikan penerimaan pemerintah. Alasan kedua, jika kausalitas dua arah antara penerimaan dan pengeluaran tidak berlaku, maka keputusan penerimaan pemerintah dibuat secara independen berdasarkan pengeluaran pemerintah. Alasan ketiga, jika hipotesis pengeluaran-pendapatan berlaku, maka pemerintah harus membelanjakan dan membayar pengeluaran sebelum meningkatkan pendapatan.

### **Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan PDRB**

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna menghasilkan barang – barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Suindyah, 2011). Menurut Sukirno (2011) pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan pemerintah membelanjakan uangnya untuk membiayai kebutuhan sehari – hari juga pembangunan daerah pengeluaran pemerintah.

Hal ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan potensi yang ada dalam daerah itu sendiri guna mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Menurut Brillianta Hanifah, A Kadir, dan Yulianita (2017) daerah yang ingin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan campur tangan pemerintah guna mengatur dan mengawasi perekonomian suatu daerah. Menurut Saidah (2011) dalam teori organis menyatakan bahwa pendapatan perkapita suatu daerah berbanding lurus dengan pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti jika pendapatan perkapita suatu daerah meningkat maka pengeluaran pemerintah meningkat juga.

Menurut Bailey (2011) mengungkapkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara mengalami peningkatan maka akan sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran yang dikeluarkan secara langsung atau pun tidak langsung. Meningkatnya PDRB menunjukkan pemerintah memiliki surplus pendapatan yang akan membantu pengeluaran mereka yang ditujukan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa PDRB memiliki hubungan positif dengan pengeluaran pemerintah.

Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik hingga keamanan sebuah negara. Dalam hal ini pemerintah juga dapat menambah pengeluarannya dengan menggunakan dana yang tidak bersumber dari pendapatan langsung mereka akan tetapi juga dapat diambil dari dana hibah dan sebagainya

Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh Rusli dan Risna (2019) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diamati dari besaran PDRB, selain itu didalam penelitian yang sama pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah.

### **Kausalitas antara Penerimaan Pemerintah dan PDRB**

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dibutuhkan beberapa indikator, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika adanya pergeseran barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu daerah dan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB memiliki hubungan dengan kegiatan perekonomian. Artinya, *product domestic regional bruto* (PDRB) tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan perekonomian suatu daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan yang terjadi pada PDRB menyebabkan peningkatan pada kegiatan perekonomian suatu daerah.

Hasil penelitian Hanafi dan Muhammad (2017) yang menemukan bahwa penerimaan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan *product domestic regional bruto*. Hal tersebut disebabkan tidak efektifnya alokasi dana yang bersumber dari pengeluaran pemerintah sehingga kontribusi pengeluaran tidak terlihat untuk mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Bailey (2011) penerimaan pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber mulai dari sektor pajak, hingga dari pembayaran hutang. Ketika PDRB yang dimiliki oleh sebuah negara mengalami peningkatan menunjukkan kegiatan produksi secara agregat dari seluruh warna negara juga mengalami peningkatan. Dimana untuk setiap pendapatan personal atau pun yang dibawah corporate tentu akan dikenakan pajak, sehingga akan menambah penerimaan pemerintah serta dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengeluaran rutin.

Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik hingga keamanan sebuah negara. Temuan tersebut juga mengisyaratkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu menjadi indikasi peningkatan penerimaan pemerintah karena adanya faktor hutang negara yang jatuh tempo atau adanya pengeluaran yang sifatnya tiba tiba yang harus dikeluarkan pemerintah seperti biaya kemanusiaan akibat bencana, wabah penyakit dan sebagainya.

### **METODE PENELITIAN**

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini dan untuk menginterpretasikan tiap-tiap variabel dalam penelitian dengan melakukan analisis statistik.

## Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Indonesia dengan rentang waktu penelitian selama sepuluh tahun. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari data yang dipublikasikan oleh Instansi terkait, yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## Defenisi Operasional Variabel

1. Penerimaan Pemerintah ( $Y_1$ )  
Penerimaan pemerintah adalah seluruh uang yang masuk ke dalam kas daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Variabel ini diukur dengan menghitung laju penerimaan pemerintah 33 provinsi di Indonesia dalam satuan persentase.
2. Pengeluaran Pemerintah ( $Y_2$ )  
Pengeluaran pemerintah adalah total seluruh pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran seluruh belanja yang dilakukan pemerintah. Pengeluaran pemerintah diukur dengan mencari laju pengeluaran pemerintah dengan satuan persentase.
3. PDRB ( $Y_3$ )  
PRDB adalah total nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat sebuah negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam mengukur PDRB maka digunakan laju pertumbuhan PDRB yang diukur dengan persentase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode analisis yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis adalah analisis time series dengan menggunakan analisis *causality granger* yang diolah dengan menggunakan Eviews. Proses pengolahan terlihat pada sub bab dibawah ini:

### Hasil Pengujian *Stationer*

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Pengujian *Stationer* Audmented Dickey Fuller (ADF)**

Variabel	Uji	<i>t</i> -statistic	Prob	Kesimpulan
<b>Indonesia Bagian Barat</b>				
Penerimaan Pemerintah	Level	-12.497	0.000	<i>Stationer</i>
Pengeluaran Pemerintah	1 st difference	-11.556	0.000	<i>Stationer</i>
Produk Domestik Regional Bruto	1 st difference	-3.887	0.002	<i>Stationer</i>
<b>Indonesia Bagian Barat</b>				
Penerimaan Pemerintah	Level	-8.114	0.000	<i>Stationer</i>
Pengeluaran Pemerintah	Level	-8.112	0.008	<i>Stationer</i>
Produk Domestik Regional Bruto	1 st difference	-51.717	0.000	<i>Stationer</i>

Sumber: Data diolah

Sesuai dengan hasil pengujian stationer dengan model *augmented dicky fuller* (ADF) terlihat masing masing variabel pengujian stationer dilakukan pada tingkat level. Setiap variabel yang diuji telah memiliki *probability* dibawa 0.05 atau nilai t-hitung > 1.95 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing masing variabel penelitian yang digunakan telah memiliki sebaran data yang *stationer*.

### Hasil Pengujian *Causality Granger*

Pengujian *causality granger* bertujuan untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling memiliki hubungan timbal balik (dua arah), atau memiliki hubungan searah atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Hasil pengujian dibagi atas dua kelompok yaitu sebagai berikut:

#### a) Pengujian *Causality Granger* Provinsi Wilayah Indonesia Bagian Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Pengujian *Causality Granger***

Keterangan	N	F-stat	Prob	Cut Off	Kesimpulan
PGP → PP	178	5.92802	0.0032	0,05	Signifikan
PP → PGP		5.90516	0.0033	0,05	Signifikan
PDRB → PP	178	13.7883	0.0000	0,05	Signifikan
PP → PDRB		0.58483	0.5583	0,05	Tidak Signifikan
PDRB → PGP	178	13.5453	0.0000	0,05	Signifikan
PGP → PDRB		0.53620	0.5859	0,05	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran 8 Olahan Data Eviews (2021)

Pada pengujian *causality granger* terlihat variabel pengeluaran pemerintah (PGP) memiliki hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah (PP) karena secara statistik nilai *probability* yang diperoleh 0.0032 jauh di bawah tingkat kesalahan 0.05. selain itu didalam pengujian juga terlihat bahwa penerimaan pemerintah (PP) juga memiliki hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah pemerintah karena secara statistik nilai *probability* dibawah 0.05. Dengan demikian peneliti menyimpulkan terdapat hubungan dua arah atau kausaliti antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah yang dimiliki provinsi yang berada dilayah Indonesia bagian barat.

Pada proses pengujian *causality granger* juga bertujuan untuk mengetahui hubungan *product domestic regional bruto* (PDRB) dengan pengeluaran pemerintah (PGP), dari pengujian diperoleh nilai *probability* 0.000. Nilai *probability* yang diperoleh jauh di bawah 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara *product domestic regional bruto* (PDRB) dengan penerimaan pemerintah (PP), didalam pengujian terlihat bahwa pengeluaran pemerintah juga tidak memiliki hubungan dengan *product domestic regional bruto*, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *probability* 0.5583 jauh diatas 0.05 dengan demikian kausaliti antara penerimaan pemerintah (PP) dengan *product domestic regional bruto* per kapita tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah 18 provinsi di wilayah Indonesia bagian barat.

Pada Tabel diatas juga terlihat hasil pengujian *causality granger* untuk mengetahui hubungan antara *product domestic regional bruto* (PDRB) terhadap pengeluaran pemerintah (PGP) diperoleh nilai *probability* sebesar 0.000. Nilai *probability* tersebut jauh dibawah 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah, sedangkan untuk pengujian satu arah antara pengeluaran pemerintah (PGP) terhadap *product domestic regional bruto* per kapita diperoleh nilai *probability* sebesar 0.5899 hasil yang diperoleh jauh diatas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan dengan PDRB per kapita 18 provinsi diwilayah Indonesia bagian barat.

#### **b) Pengujian Causality Granger Provinsi Wilayah Indonesia Bagian timur**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan terlihat pada Tabel 5 di bawah ini:

**Tabel 5. Hasil Pengujian Causality Granger**

Keterangan	N	F-stat	Prob	Cut Off	Kesimpulan
PGP → PP	148	7.90969	0.0006	0,05	Signifikan
PP → PGP		7.89160	0.0006	0,05	Signifikan
PDRB → PP	148	4.97732	0.0081	0,05	Signifikan
PP → PDRB		2.24514	0.1096	0,05	Tidak Signifikan
PDRB → PGP	148	4.97893	0.0081	0,05	Signifikan
PGP → PDRB		2.24898	0.1092	0,05	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran 8 Olahan Data Eviews (2021)

Pada pengujian *causality granger* terlihat variabel pengeluaran pemerintah (PGP) memiliki hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah (PP) karena secara statistik nilai *probability* yang diperoleh 0.0006 jauh di bawah tingkat kesalahan 0.05. selain itu didalam pengujian juga terlihat bahwa penerimaan pemerintah (PP) juga memiliki hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah pemerintah karena secara statistik nilai *probability* dibawah 0.05. Dengan demikian peneliti menyimpulkan terdapat hubungan dua arah atau kausaliti antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah yang dimiliki provisi yang berada dilayah Indonesia bagian timur.

Pada proses pengujian *causality granger* juga bertujuan untuk mengetahui hubungan *product domestic regional bruto* per kapita dengan penerimaan pemerintah (PGP), dari pengujian diperoleh nilai *probability* 0.008. Nilai *probability* yang diperoleh jauh di bawah 0.05 dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara *product domestic regional bruto* per kapita dengan penerimaan pemerintah (PP), didalam pengujian terlihat bahwa penerimaan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan *product domestic regional bruto* per kapita, hal tersebut dibuktikan dengan nilai *probability* 0.1096 jauh diatas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah 15 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur.

Berdasarkan pengujian *causality granger* untuk mengetahui hubungan antara *product domestic regional bruto* (PDRB) terhadap pengeluaran pemerintah (PGP) diperoleh nilai *probability* sebesar 0.008. Nilai *probability* tersebut jauh dibawah 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah, sedangkan untuk pengujian satu arah antara pengeluaran pemerintah (PGP)

terhadap *product domestic regional bruto* per kapita diperoleh nilai *probability* sebesar 0.1092 hasil yang diperoleh jauh diatas 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan dengan PDRB per kapita 18 provinsi diwilayah Indonesia bagian barat.

### **Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa terjadi kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian penerimaan pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah, serta penerimaan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah khususnya pada 18 provinsi diwilayah Indonesia bagian Barat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima.

Temuan yang diperoleh tersebut disebabkan ketika pengeluara pemerintah meningkat maka harapan pemerintah akan memperoleh penerimaan yang juga tinggi. Pemerintah tentu berani mengambil risiko mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur fisik mengharapakan pengembalian yang sepadan. Melalui perencanaan yang tepat pemerintah berani mengeluarkan biaya yang besar untuk menciptakan pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia bagian barat, pembangunan yang dibagun dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pun investor yang mendapatkn izin kerja di Indonesia. Pemanfaatan fasilitas pemerintah dan sumber daya di Indonesia tentu mendorong pihak yang memanfaatkannya untuk membayar pajak, sehingga mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah daerah.

Selain itu ketika penerimaan pemerintah mengalami peningkatan maka pemerintah akan merencanakan pengeluaran yang lebih besar, dalam bentuk distribusi alokasi dana belanja dimasing-masing daerah atau pun dalam bentuk bantuan kedaerah atau provinsi yang tidak begitu banyak sumber daya. Pemerintah setiap daerah tentu akan terus meningkatkan pengeluaran atau belanja pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga sektor fisik dan investasi. Ketika sektor tersebut berhasil dikembangkan maka penerimaan pemerintah kembali akan dapat meningkat baik diperoleh dari pajak daerah, retribusi hingga biaya penyewaan aset pemerintah.

Hasil yang diperoleh tersebut didukung oleh penelitian Ridwan (2015) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pemerintah dengan perubahan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh oleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa besarnya penerimaan pemerintah bukanlah satu satu faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah. Munculnya bencana alam, konflik politik, resesi hingga bencana alam yang tidak terduga ikut mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

### **Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis juga ditemukan bahwa terjadi kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian penerimaan pemerintah memiliki hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah, serta penerimaan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan pengeluaran pemerintah

khususnya pada 15 provinsi di wilayah Indonesia bagian Timur. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima.

Pada hasil pengujian dinyatakan bahwa pengeluaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah di wilayah Indonesia bagian timur, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur baik dari sisi pendidikan, kesehatan atau pun fasilitas fisik termasuk investasi guna mengejar ketinggalan sejumlah provinsi di wilayah timur dengan provinsi di wilayah barat. Pemerintah masing masing daerah membuat perencanaan dan program pembangunan yang tepat, dengan harapan alokasi pengeluaran pemerintah dapat memberikan penerimaan yang signifikan. Peningkatan penerimaan di prioritaskan dari sektor pajak daerah, serta investasi domestik dan mancanegara.

Ketika penerimaan meningkat, tentu mendorong pemerintah untuk memperbesar pengeluaran mereka, untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kembali penerimaan pemerintah. Selain itu dengan bertambah besar belanja daerah khususnya pada provinsi di bagian timur Indonesia. Selain itu bagi pemerintah pusat meningkatnya penerimaan pemerintah daerah tentu memberikan sumbangan penerimaan yang besar pula bagi pusat, dana tersebut tentu akan mendorong menambah jumlah pengeluaran pemerintah pusat khususnya untuk mengalokasikan sejumlah dana bantuan kepada daerah yang mendapatkan penerimaan yang rendah akibat keterbatasan sumber daya sehingga daerah tersebut juga maju dan berkembang.

### **Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa tidak terdapat kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan PDRB per kapita 18 provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Pada pengujian kausalitas diketahui terjadi hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

Temuan yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa ketika PDRB per kapita masing masing provinsi meningkat maka penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan ketika PDRB per kapita meningkat menunjukkan kemampuan masyarakat dalam usia produktif dimasing-masing provinsi untuk menghasilkan bidang pekerjaan yang dapat memberikan output kepada masyarakat itu sendiri dan pemerintah semakin baik. Maju unit usaha yang dikembangkan masyarakat, meningkatnya penjualan industri dan pabrik mengisyaratkan PDRB per kapita yang terus menguat, sehingga akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan khususnya diperoleh dari sektor pajak

Pada model pengujian statistik terlihat bahwa penerimaan pemerintah tidak memiliki hubungan dengan PDRB per kapita. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha yang berkembang tidak dibiayai atas bantuan pemerintah melainkan atas dana swadaya masyarakat. Selain itu penerimaan pemerintah memang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur mulai dari pendidikan, kesehatan dan fisik tetapi kontribusi pemerintah untuk membantu usaha yang dikembangkan masyarakat atau pun dunia usaha berkala besar tidak begitu banyak dilakukan sehingga masyarakat mengembangkan usaha melalui kreatifitas sendiri sehingga mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Muhammad (2017) yang menemukan bahwa penerimaan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik hingga keamanan sebuah negara. Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh Rusli and Risna (2019) yang menemukan bahwa *product domestic regional bruto* tidak mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah.

### **Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur**

Hasil pengujian hipotesis kedua juga ditemukan bahwa tidak terdapat kausalitas antara penerimaan pemerintah dengan PDRB per kapita 15 provinsi yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Pada pengujian kausalitas diketahui terjadi hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

Temuan yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa ketika PDRB per kapita masing masing provinsi meningkat maka penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan ketika PDRB per kapita meningkat menunjukkan kemampuan masyarakat dalam usia produktif dimasing-masing provinsi untuk menghasilkan bidang pekerjaan yang dapat memberikan output kepada masyarakat itu sendiri dan pemerintah semakin baik. Maju unit usaha yang dikembangkan masyarakat, meningkatnya penjualan industri dan pabrik mengisyaratkan PDRB per kapita yang terus menguat, sehingga akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan tambahan pendapatan khususnya diperoleh dari sektor pajak

### **Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat**

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa PDRB per kapita memiliki hubungan searah dengan pengeluaran pemerintah daerah di 18 provinsi di wilayah barat Indonesia sedangkan pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan PDRB per kapita pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia. Dengan demikian tidak adanya kausalitas antara pengeluaran dengan PDRB per kapita 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tidak dapat dibuktikan.

Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan ketika PDRB per kapita mengalami peningkatan maka akan sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di 18 provinsi di wilayah barat Indonesia. Keadaan tersebut menunjukkan ketika unit usaha masyarakat terus mengalami peningkatan, maka pemerintah akan terus berusaha meningkatkan pengeluarannya untuk pengembangan infrastruktur yang dapat menopang unit usaha yang dilakukan masyarakat, seperti membangun fasilitas dan prasarana retail, pusat perbelanjaan, hingga kawasan industri dan aglomerasi. Pemerintah menyadari ketika unit usaha masyarakat dapat menghasilkan output yang baik maka unit usaha tersebut akan memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah sehingga pemerintah dapat memperbesar belanja mereka. Dimana pengeluaran yang semakin besar tersebut akan terus digunakan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di daerah daerah diseluruh Indonesia.

Pada model pengujian statistik juga diketahui bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan dengan PDRB per kapita diraih masyarakat pada sejumlah provinsi di Indonesia. Keadaan tersebut disara wajar karna alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong meningkatnya pemerataan infrastruktur baik dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas fisik masih dalam tahap pembangunan dan belum dimanfaatkan secara maksimal, manfaat dari pengeluaran besar yang telah dilakukan pemerintah akan terlihat dalam jangka panjang, oleh sebab itu pada saat ini unit usaha yang dikembangkan masyarakat lebih di dorong oleh swadaya mandiri dari masyarakat.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Muhammad (2017) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Temuan yang sejalan juga diperoleh Sitaniapessy (2019) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati dari PDRB tidak saja dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah akan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh situasi politik hingga keamanan sebuah negara. Selanjutnya hasil penelitian yang sejalan juga diperoleh Rusli and Risna (2019) yang menemukan bahwa *product domestic regional bruto* tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

### **Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan PDRB pada Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur**

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa PDRB per kapita memiliki hubungan searah dengan pengeluaran pemerintah daerah di 15 provinsi diwilayah timur Indonesia sedangkan pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan PDRB per kapita pada 15 provinsi diwilayah timur Indonesai. Dengan demikian tidak adanya kausalitas antara pengeluaran dengan PDRB per kapita 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tidak dapat dibuktikan.

Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan ketika PDRB per kapita mengalami peningkatan maka akan sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah di 15 provinsi di wilayah timur Indonesia. Keadaan tersebut menunjukkan ketika unit usaha masyarakat terus mengalami peningkatan, maka pemerintah akan terus berusaha meningkatkan pengeluarannya untuk pengembangan infrastruktur yang dapat menopang unit usaha yang dilakukan masyarakat, seperti membangun fasilitas dan prasarana retail, pusat perbelanjaan, hingga kawaasan industri dan aglomarasi. Pemerintah menyadari ketika unit usaha masyarakat dapat menghasilkan output yang baik maka unit usaha tersebut akan memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah sehigga pemerintah dapat memperbesar belanja mereka. Dimana pengeluaran yang semakin besar tersebut akan terus digunakan pemerintah untuk menciptakan pemerastan pembanguna di daerah daerah diseluruh Indonesia.

Pada model pengujian statistik juga diketahui bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan dengan PDRB per kapita diraih masyarakat pada sejumlah provinsi di Indonesia. Keadan tersebut disara wajar karna alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong meningkatnya pemerataan infrastruktur baik dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas fisik masih dalam tahap pembangunan dan belum dimanfaatkan secara maksimal, manfaat dari pengeluaran besar yang telah dilakukan pemerintah akan terlihat dalam jangka panjang, oleh sebab itu pada saat ini unit usaha yang dikembangkan masyarakat lebih di dorong oleh swadaya mandiri dari masyarakat.

## SIMPULAN

Sesuai dengan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu:

1. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia.
2. Terdapat hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia.
3. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah.
4. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara penerimaan pemerintah daerah dengan PDRB pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan penerimaan pemerintah.
5. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada 18 provinsi di wilayah barat Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah.
6. Tidak terjadi hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah daerah dengan PDRB pada 15 provinsi di wilayah timur Indonesia tetapi terdapat hubungan searah antara PDRB per kapita dengan pengeluaran pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Eideh, Omar Mahmoud. 2015. "Causality Between Public Expenditure and GDP Growth In Palestine : An Econometric Analysis Of Wagner ' s Law." *Journal of Economics and Sustainable Development* 6(2):189–200.
- Adi, Priyo Hari. 2008. "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se- Jawa)." *The 2nd National Conference Faculty of Economics Widya Mandala Ctholic University*.
- Al-Zeaud, H. A. 2015. "The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Jordan." *International Journal of Management and Business Research* 5(2):117–27.
- Ali, R. and M. Syah. 2012. "The Causal Relationship Between Government Expenditure and Revenue in Pakistan." *Interdisciplinary Ournal of Contemporary Research in Business* 3(12):323–29.
- Anne Sere, Kebitsamang and Ireen Choga. 2017. "The Causal and Cointegration Relationship Between Government Revenue and Government Expenditure." *Public and Municipal Finance* 6(3):23–32.
- Bailey, Stephen J. 2011. *Public Sector Economics Theory, Policy and Practice*. Vol. 44.
- Baniata, Atef Khalil, Financial Economies, and Ahmad Al-waked. 2017. "The Relationship between Government Expenditure and GDP : Empirical Testing of Wagner ' s Law in the Jordanian Economy." *Journal of Economic Cooperation and Development*.
- Brillianta Hanifah, Nadine, Syamsurijal A Kadir, and Anna Yulianita. 2017. "Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(1):15–34.
- Ebaidalla, M. E. 2013. "Causality between Governmet Expenditure and National Income: Evidece Frm Sudan." *Journal of Economic Cooperation and Development* 34(4):61–76.
- Eita, Joel H. and Daisy Mbazima. 2008. "The Causal Relationship between Government Revenue and Expenditure in Namibia." *Journal of Economic and Financial Sciences* 2(2):175–86.
- Elyasi, Yousef and Mohammad Rahimi. 2012. "The Causality between Government Revenue and Government Expenditure in Iran." *International Journal of Economic Sciences and Applied Research* 5(1):129–45.
- Hanafi, Maulida and Zuhroh Muhammad. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Kajian Ekonomi Pembangunan* 15(2).
- Indonesia, Republik. 2009. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Indonesia.
- Lessmann, C. and G. Markwardt. 2012. "Aid, Growth and Devolution." *World Development*

- 40(9):1723–49.
- Mehrara, Mohsen, Mosayab Pahlavani, and Yousef Elyasi. 2011. "Government Revenue and Government Expenditure Nexus in Asian Countries: Panel Cointegration and Causality." *International Journal of Business and Social Science* 2(7):199–207.
- Mehrara, Mohsen and Abbas ali Rezaei. 2014. "The Relationship between Government Revenue and Government Expenditure in Iran." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 4(3).
- Parmawati, Eka. 2010. "Kausalitas Penerimaan, Belanja Dan PDRB Kabupaten/Kota Di Indonesia." Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Anitasari and Soleh Rahmad. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pemerintah." *Jurnal Kombinasi Pembangunan* 13(1):31–42.
- Ridwan, Nasir. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia." *Kajian Riset Pembangunan* 4(1).
- Rizki, Konyongin, Sinta, and Dwi Atmono. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Provinsi Di Indonesia Analysis Time Series Tahun 2009 - 2018." *Jurnal Fekon* 16(2).
- Rori, Chindy Febry, Antonius Y. Luntungan, Audie O. Niode, Jurusan Ekonomi Pembangunan, and Fakultas Ekonomi. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16(2):243–54.
- Rusli, Maisaroh and Riswanto Risna. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh Provinsi Di Indonesia)." *Jurnal Komersial Pembangunan Strategis* 23(2):32–41.
- Sahed, Abdelkader, Mohammed Mékidiche, and Hacem Kahoui. 2020. "The Relationship between Government Expenditures and Revenues in Algeria During the Period (1990-2019): Granger Causality Approach." *European Journal of Business and Management Research* 5(5):1–5.
- Saidah, Nur. 2011. "Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011)." *Jurnal Ilmiah*.
- Santi, Nindya Eka, Aisyah Jumiarti, and Fivien Muslihatinningsih. 2018. "Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember Dan Sekitarnya." *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5(1):6–10.
- Setyawan, Zahari. 2017. "Simultan Model Pengaruh Penerimaan Pemerintah, Product Domestic Regional Bruto Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pemerintah (Studi Empiris Pada Seluruh Provinsi Di Pulau Jawa)." *Jurnal Equivalence Pembangunan* 4(1):71–93.
- Sitaniapessy. 2019. "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Ddan Kota Di Indonesia." *Jurnal Dirgantara Pembangunan* 5(2).
- Suindyah, Sayekti. 2011. "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di PProvinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekuitas* 15(4):477–500.
- Wulansari, Indah. 2009. "Kausalitas Antara Pegeluaran Pemerintah Daerah Dan PDRB Di Jawa Timur Periode 1977 – 2004." Airlangga.